

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan sebuah aplikasi akuntansi yang digunakan untuk keuangan negara atau daerah, khususnya pada pelaksanaan anggaran, termasuk semua pengaruh yang timbul, baik secara langsung maupun yang menetap atau permanen terhadap keseluruhan aspek dan unit pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan termasuk untuk akuntansi lembaga nonprofit, adalah suatu bagian dari akuntansi yang di dalamnya terdapat lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya yang mempunyai tujuan untuk tidak mencari keuntungan atau laba.¹⁰

Akuntansi pemerintahan merupakan sebuah kegiatan yang memberikan jasa untuk menyediakan sebuah data keuangan pemerintah berdasar proses pencatatan, pemilahan sesuai dengan klasifikasinya, penggolongan suatu transaksi serta penafsiran terhadap informasi data keuangan tersebut. Sedangkan menurut Abdul Halim, Akuntansi Pemerintahan merupakan kegiatan di bidang jasa yang didalamnya termasuk penyedia informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna memberikan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai pengambil keputusan ekonomi.¹¹

¹⁰ Conda Liesy Y, dkk, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2, 2017, hlm 124

¹¹ Ibid, hlm 125

2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah satu dari beberapa faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas keuangan negara atau daerah serta pelaporan sebuah keuangan pemerintah. Standar akuntansi dalam pemerintah perlu dinaikkan guna memperbaiki praktik akuntansi keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan¹²

B. Aset Daerah

1. Pengertian Aset Daerah

Aset adalah semua kekayaan daerah baik didapatkan atas proses pembelian atau diperoleh baik bergerak ataupun tidak bergerak termasuk bagiannya yang dapat diketahui jumlahnya, yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah dan semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya.¹³

Aset Daerah adalah semua barang yang didapatkan baik dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.¹⁴ Penatausahaan aset daerah merupakan salah satu bagian dari rangkaian sistem akuntansi, yang di dalamnya adalah bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem ini dibuat dengan tujuan menghasilkan

¹² Conda Liesy Y, dkk, *Analisis Pengelolaan Barang.....* hlm 125

¹³ Stanly C. F.. Tukunang, *Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*, Jurnal EMBA Vol 4 No 2 tahun 2016 hlm 237

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara <https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada 18 november 2019

informasi-informasi yang berguna bagi pihak yang terkait dalam sebuah organisasi. Apabila penyajian informasi penatausahaan aset daerah tersebut memadai, maka informasi yang di dapatkan bisa dibilang sebagai informasi yang berkualitas. Informasi berkualitas menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas juga. Penatausahaan aset daerah adalah sebuah faktor penting dalam mewujudkan sebuah laporan keuangan yang lebih baik¹⁵

Macam-macam klasifikasi aset tetap yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan :

- a. Tanah termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang didapatkan dengan tujuan untuk digunakan kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin termasuk dalam mesin, kendaraan bermotor, elektronik, serta semua yang termasuk dalam inventaris kantor, perlaatan lain yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan kondisi siap pakai.
- c. Gedung atau Bangunan, termasuk keseluruhan yang menjadi bagian gedung dan bangunan, yang didapatkan dengan tujuan untuk difungsikan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- d. Jalan, Irigasi, termasuk juga jaringan yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun pemerintah dan dimiliki baik dibangun secara langsung oleh pemerintah atau didapatkan dari pihak lain dan

¹⁵ Anshari, *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik*hlm 4

dikuasai oleh pemerintah serta dalam kondisi siap pakai.

- e. Aset tetap lainnya termasuk dalam aset tetap yang tidak termasuk kedalam kelompok aset tetap di atas, yang dalam proses mendapatkannya asset tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai¹⁶

2. Jenis Barang Milik Daerah

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam PP No 27 Tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik daerah, barang milik daerah atau aset daerah meliputi :

- a. Barang yang di beli atau di dapatkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- b. Barang yang berasal dari perolehan yang sah, barang yang berasal dari perolehan yang sah meliputi :
 - a). Barang dari hibah atau sumbangan
 - b). Barang yang diperoleh dari hasil perjanjian atau kontrak
 - c). Barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah www.djkg.depkeu.go.id diakses pada 18 November 2019

d). Barang yang diperoleh atas putusan pengadilan dan berkekuatan hukum.¹⁷

Dilihat dari mobilitas barangnya, barang milik daerah dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, gedung, bangunan, air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan serta monument atau bangunan bersejarah.
2. Benda bergerak seperti mesin, kendaraan, peralatan (seperti alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, buku atau perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, tanaman dan persediaan (barang habis pakai, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya), serta surat-surat berharga.¹⁸

Aset di klasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar:

- a. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
- b. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yaitu meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah www.djkg.kemenkeu.go.id diakses pada 18 November 2019

¹⁸ Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta) hlm 146

Sementara secara umum aset dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu :

- a). Aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
- b). Aset non keuangan meliputi asset tetap, asset lainnya dan persediaan.

3. Penatausahaan Aset Daerah

Penatausahaan aset daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang dihasilkan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Penatausahaan barang milik daerah dalam mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Dalam penatausahaan barang milik daerah ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah.¹⁹

Penatausahaan barang milik daerah dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

¹⁹ Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah www.bpkd.go.id diakses pada 18 November 2019

a. Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengelola menurut golongan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format.²⁰

1). Kartu Inventaris Barang (KIB)

Kartu inventaris barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga perolehan dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang tersebut belum dihapuskan. Terdapat empat macam Kartu Inventaris Barang (KIB) yaitu :

- a). KIB A Tanah
- b). KIB B Peralatan dan Mesin
- c). KIB C Gedung dan Bangunan
- d). KIB D Jalan, Irigasi, dan Jaringan

²⁰ Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah www.bpkd.go.id diakses pada 18 November 2019

e). KIB E Aset Tetap Lainnya

f). KIB F Konstruksi dalam pengerjaan.

2.) Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) ini harus dipasang disetiap ruangan kerja. Pemasangan maupun pencatatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) merupakan tanggungjawab pengurus barang dan Kepala Ruangan disetiap SKPD.

b. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Inventarisasi barang-barang milik daerah paling sedikit dilakukan 1 kali dalam 5 tahun oleh pengguna barang. Tetapi inventarisasi dilakukan setiap tahun untuk barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam

pengerjaan.²¹

Dari kegiatan inventarisasi maka disusunlah Buku Inventaris (BI) yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaraan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk, jumlah, type, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Kemudian dari BI tiap-tiap SKPD dilakukan penggabungan menjadi Buku Induk Inventaris (BII).²² Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka :

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamatan dan pengawasan setiap barang;
2. Usaha untuk menggunakan, memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
3. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris

²¹ Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah www.bpkd.go.id diakses pada 18 November 2019

²² Anggraeini, Ayang Putri Septiayu.. *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal AKuntansi 2015*

dapat digunakan dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan ganti rugi.

c. Pelaporan

Pelaporan barang milik daerah yang dilakukan kuasa pengguna barang harus disampaikan setiap semesteran dan tahunan kepada pengguna barang. Hasil dari laporan kuasa pengguna barang yang disampaikan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan

tahunan yang kemudian akan disampaikan kepada pengelola barang sebagai dasar dalam penyusunan SKPD.²³ Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semesteran dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran dan tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran dan tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Hasil sensus barang dari hasil masing-masing pengguna atau kuasa pengguna, direkap kedalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada:

²³ Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah www.bpkd.go.id diakses pada 18 November 2019

1. Laporan Mutasi Barang

Laporan Mutasi Barang merupakan laporan mutasi barang per semester dari SKPD kepada pembantu pengelola.

2. Daftar Mutasi Barang

Daftar Mutasi Barang merupakan laporan mutasi barang per tahun dari SKPD kepada Bagian Perlengkap.

4. Aset Daerah Sesuai Dengan Pandangan Islam

Aset daerah adalah suatu kekayaan publik atau harta bersama milik masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum. Secara umum Al-Quran telah menggambarkan kecenderungan manusia untuk menyukai dan memiliki harta. Harta bisa berupa emas, perak, binatang ternak, sawah, ladang, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu diperlukan untuk hajat kehidupan.²⁴ Sejalan dengan konteks zaman maka jenis harta bisa berubah, kini harta bisa berupa kendaraan, gadget, apartemen, saham,

²⁴ Rusdan, *Konsep Harta (AL-MAAL) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal El-Hikam, Vol 10 No 02 Tahun 2017 hlm 366

deposito, dan lain-lain. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu juga mencakup kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan harta itu. Tentunya ia wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan harta.²⁵

Makna maal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia. Adapun tujuan pokok dari harta itu ialah membantu untuk memakmurkan bumi dan mengabdikan kepada Allah. Harta merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, baik kebutuhan untuk makan, pakaian maupun tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki dan karunia Allah yang sudah tersedia dimuka bumi ini.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ يَكْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)

Artinya :

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Mengetahui segala sesuatu.

²⁵Miftahul Huda, *Peranan Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Harta*, Jurnal Ekonomi Islam An-Nisbah, Vol 05 No 2, 2019, hlm 43

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini untuk manusia. Tugas manusia adalah mencari dan kemudian mengelola baham-bahan yang disediakan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

C. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intenal adalah suatu proses tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh ketua instansi dan semua pegawai yang ada di dalamnya guna memberikan rasa yakin atas tercapainya tujuan organisasi.²⁶ Pengendalian internal adalah representative dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, dimana proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditunjukkan untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tujuan pengendalian²⁷

Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal seperti rencana organisasi dan metode serta aturan yang terstruktur di sebuah instansi atau perusahaan bertujuan untuk menjaga kekayaan, keakuratan berapa jauh data yang digunakan dalam akuntansi dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah efisiensi usaha serta mendorong terlaksananya peraturan pimpinan yang telah ditentukan.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal www.bpkp.go.id diakses pada 18 November 2019

²⁷ Vani adelin, *Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada BUMN Di Kota Padang*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol 1 No 3, 2013, hlm 4

2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Komponen atau unsur sistem pengendalian internal ini mengacu pada sistem pengendalian internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi:

a. Pengendalian Lingkungan

Pimpinan instansi dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya dilakukan dengan:
 - a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku
 - b) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah
 - c) Menegakkan tindakan disiplin
 - d) Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern
 - e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.²⁸

2. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen sebagaimana dimaksud dilakukan dengan :

- a) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang diperlukan untuk

menyelesaikan tugas masing-masing posisi di instansi pemerintahan.

- b) Menyusun standar kompetensi pada setiap posisi dalam instansi pemerintahan.
- c) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan standar kompetensi karyawan.
- d) Memilih pimpinan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintahan.

Ditunjukkan dengan:

- a. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif ditunjukkan dengan:

- a) Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan
- b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja
- c) Mendukung fungsi tertentu
- d) Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
- e) Melakukan interaksi secara intensif dengan rekan kerja pada tingkatan lebih rendah
- f) Merespon positif pada setiap pelaporan

- b. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi yang dibutuhkan seperti :

- a) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah
- b) Memberikan tanggung jawab dan wewenang yang jelas

²⁸ Vani adelin, *Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi.....* hlm 4

- c) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi pemerintah
- d) Melakukan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi
- e) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai
 - c. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - d. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 - e. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
 - f. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintahan terkait.²⁹

g. Penilaian risiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam, penilaian risiko terdiri atas:

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko terdiri atas:

- a) Menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah
- b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan eksternal
- c) Penilaian faktor lain yang dapat meningkatkan resiko

2. Analisis risiko

Analisis risiko digunakan untuk menentukan pengaruh yang ditimbulkan dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintahan.

h. Informasi dan Komunikasi.

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.³⁰ Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

i. Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan dari pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus bersifat efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian yang dimaksud terdiri atas:

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah www.bpk.go.id diakses pada 18 November 2019

³⁰ Faiz Zamzani,dkk.2014. *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press). Hlm 31

1. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
 2. Pembinaan sumber daya manusia
 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pengendalian fisik atas aset.
 4. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
 5. Pemisahan fungsi
 6. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 7. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 8. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 9. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 10. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting
- j. Pemantauan atau pengawasan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tinjau lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. kegiatan pemantauan ini harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu.³¹

3. Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dan pengelolaan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pimpinan melakukan

³¹ Faiz Zamzani, dkk. 2014. *Audit Keuangan Sektor Publik* hlm 32

kegiatan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.³² Tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi aset (termasuk data-data daerah)
- b. Memelihara catatan secara rinci dan akurat
- c. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan adil
- d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku
- e. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- f. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku

Sistem pengendalian internal sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Organisasi apapun perlu memiliki dan membangun sistem pengendalian intenal yang baik dan andal. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik maka berbagai penyimpangan, kecurangan, korupsi dan kesalahan dapat diminimalisir.³³

D. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi keuangan sebuah entitas yang dibuat untuk kepentingan pihak internal maupun eksternal dari entitas tersebut. Sedangkan laporan keuangan daerah adalah sebuah informasi

³² Novtania Mokoginta,dkk, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2 2017 hlm 876

keuangan yang dibuat oleh pemerintahan daerah dan ditujukan sarana informasi kepentingan pihak luar pemerintah daerah. Laporan Keuangan Daerah adalah sebuah inti dari proses pencatatan keuangan dari entitas pemerintahan, suatu inti dari semua keluar masuknya keuangan yang terjadi selama satu tahun atau 12 bulan yang bersangkutan dan juga laporan keuangan adalah sebuah bukti pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyatnya terhadap pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.³⁴ Laporan keuangan menjadi media yang dipakai untuk menunjukkan seberapa besar pencapaian kinerja suatu entitas dan pelaksanaan fungsi pertanggung jawaban.³⁵ Pertanggung jawaban atas kondisi keuangan sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat telah dijelaskan pada Ash Syuara ayat 181 – 184.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الْأُولَى (١٨٤)

Artinya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat.

³³ Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta) hlm 20

³⁴ Mia Oktrani,dkk, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang*, Jurnal Akuntansi, Vol 2 No 2 Tahun 2016, hlm 4

³⁵ Novtania Mokoginta,dkk, *Pengaruh Sistem Pengendalian*hlm 876

Pengertian dari surat Ash Syuara ayat 181 – 184 adalah hendaknya pemerintah mengelola dan memanfaatkan aset sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang hasilnya nanti digunakan untuk kepentingan rakyat. Laporan keuangan yang dibuat juga harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya – sebenarnya.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Dalam Laporan keuangan pemerintahan semestinya memaparkan data dan informasi yang mempunyai nilai manfaat untuk para pengguna dalam menilai suatu akuntabilitas serta membuat kebijakan baik kebijakan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Memberikan data dan informasi yang relevan perihal sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Memberikan data dan informasi yang relevan terkait dengan kebutuhan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Memberikan data dan informasi yang relevan terkait dengan jumlah sumber daya ekonomi yang telah dipakai pada setiap kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai
- d. Memberikan data dan informasi yang relevan terkait dengan bagaimana suatu entitas pelaporan mendanai semua kegiatan dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Memberikan data dan informasi yang relevan terkait dengan posisi serta kondisi entitas pelaporan yang berhubungan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang bermula dari

pajak maupun pinjaman.

- f. Memberikan data dan informasi yang relevan terkait dengan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.³⁶

3. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik Laporan Keuangan tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya.³⁷ Beberapa karakteristik berikut adalah prasyarat normative yang dibutuhkan agar laporan keuangan dapat memenuhi syarat yang dikehendaki.

a. Relevan

Sebuah laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang ada di dalamnya mampu mempengaruhi hasil dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan mampu digunakan untuk memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memberikan umpan balik
2. Memberikan manfaat prediktif
3. Disajikan tepat waktu
4. Lengkap

b. Andal

³⁶ Novtania Mokoginta, dkk, *Pengaruh Sistem Pengendalian...* hlm 878

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah www.djkg.depkeu.go.id diakses pada 18 November 2019

Andal disini bisa diartikan dalam bebas dari informasi yang menyesatkan atau membingungkan dan bebas dari kesalahan, penyajian setiap informasi secara jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi yang andal mempunyai karakteristik:

1. Penyajiannya jujur

Informasi yang disajikan secara wajar dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

2. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, apabila pengujian dilakukan beberapa kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya akan menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Bersifat netral

Informasi ditujukan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Bisa Dibandingkan

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan akan dapat lebih maksimal bermanfaat jika bias dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal bias dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Bisa Dipahami

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan mampu dan mudah dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. Pengguna di asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempelajari yang dimaksud.

4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan ini menyajikan informasi terkait kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih taun pelapora diperbandingkan dengan taun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu

d. Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah eekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah.

e. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasi, investasi,

pendanaan, transitoris yang menggambarkan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan³⁸

Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas. Mencakup juga informasi suatu kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan di anjurkan untuk diungkapkan.

³⁸Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 200 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
www.djkg.depkeu.go.id diakses pada 18 November 2019

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Anzari Dan Efrizal Sofyan (2013)³⁹, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan bersifat kausatif atau sebab akibat dimana menggambarkan suatu masalah. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampel. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Inventaris aset daerah, legal audit, penilaian barang milik daerah dan pengendalian pengawasan barang Menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Padang. Artinya semakin baik inventarisasi Asset akan memperbaiki kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Padang. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah variabel bebas (independent) sama-sama mencari pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meskipun waktu dan lokasi penelitian berbeda.

Penelitian oleh Yulpi Poae, dkk (2016)⁴⁰ dengan judul Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Penelitian ini menunjukkan perencanaan BMD berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Secara unsur statistik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan

³⁹Anshari, *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pdang*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 4 No 1 tahun 2016 hlm 15

⁴⁰ Yulpi Poae, *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 8 No 1 Tahun 2017, hlm167-168

Talaud sedangkan secara unsur penilaian, dan pengendalian Barang Milik Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah variabel bebas (independent) sama-sama mencari pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meskipun waktu dan lokasi penelitian berbeda.

Penelitian oleh Condal Liesy, dkk (2017)⁴¹ dengan judul Analisis pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan data sumber primer dan sumber sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pengelolaan barang milik daerah atau bisa disebut juga dengan aset daerah di pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2015 sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 17 Tahun 2007. Pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Minahasa utara sudah sesuai dengan 13 siklus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, dan sekarang sudah mengacu terhadap peraturan baru yaitu Permendagri no. 19 taun 2016. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah Variabel Independen sama-sama mencari pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah walaupun waktu dan lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian oleh Novtania Mokoginta (2017)⁴² dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualias Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁴¹Conda Liesy Y, dkk, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2, 2017, hlm 129

⁴²Novtania Mokoginta, dkk, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2 2017 hlm 88

kuantitatif dengan jenis penelitian merupakan penelitian explanatory dimana bermaksud untuk menjelaskan kejelasan fenomena secara empiris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil ini didapatkan dari data yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern di BPKAD Bolang Mongondow Utara sudah dilaksanakan dengan baik namun pada pengaplikasiannya ada beberapa aspek yang belum dijalankan secara efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah Variabel Independen sama-sama mencari pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah walaupun waktu dan lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian oleh Desiana Anugrah Budiawan (2014)⁴³ dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah I Bogor Jawa Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menginterpretasikan dan menjelaskan bukti empiris tersebut dari perspektif teori institusional (institutional theory). Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hasil penelitian mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari Sistem Pengendalian Internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dapat diambil kesimpulan bahwa: sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah kota Bogor

⁴³Desiana Anugrah B, Budi. S.B, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No 1 , 2014, hlm 285-286

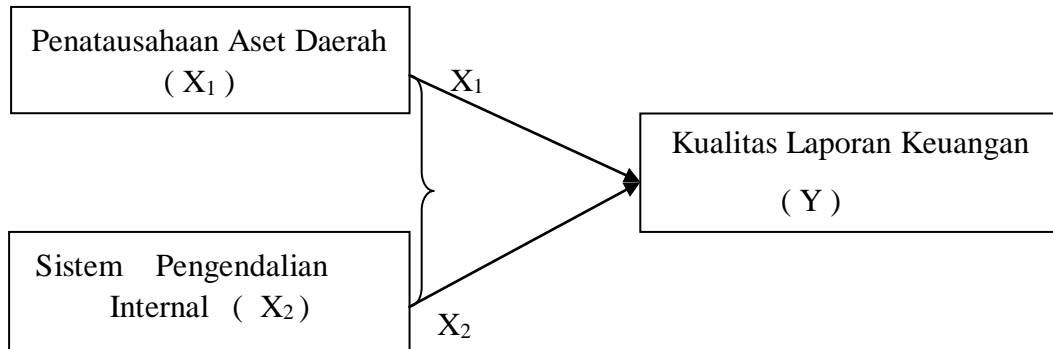
Provinsi Jawa Barat. Dalam prakteknya sistem pengendalian internal yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Jika kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat. Jika kekuatan koersif meningkat maka kualitas laporan keuangan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat juga akan meningkat. Persamaan dari penelitian lainnya adalah Variable independen sama-sama yaitu sistem pengendalian internal, dan sama- sama mencari pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meskipun lokasi dan tahun penelitian yang berbeda.

Penelitian oleh Ni Luh Nyoman, dkk (2014)⁴⁴ dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staff Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Pada penelitian ini membahas tentang sistem pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : standart akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sebuah laporan. Ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya standar penerapan akuntansi pemerintahan maka akan meningkat juga kualitas laporan keuangan yang akan

⁴⁴ Ni Luh Nyoman, dkk, *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*, *Jurnal Akuntansi*, Vol 2 No 1, 2014

dihasilkan dari daerah kabupaten Buleleng sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini bisa diartikan Semakin tinggi penerapan sistem pengendalian di lingkungan organisasi maka akan semakin meningkat pula kualitas yang dihasilkan dalam sebuah laporan keuangan pemerintah Kota Buleleng. Dalam hal kompetensi staf akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ini artinya semakin meningkatnya kompetensi yang dimiliki maka akan semakin meningkat juga kualitas yang di hasilkan dari laporan keuangan Kabupaten Buleleng. Dari segi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staff akuntansi secara garis besar mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap sebuah laporan keuangan. Ini menandakan bahwa semakin tinggi pula tingkat penetapan standar akuntansi pemerintahan, ditem pengendalian internal, dan kompetensi staff akuntansi maka akan semakin meningkat pula kualitas yang dihasilkan dari sebuah laporan keuangan pemerintah Kota Buleleng. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah variable independen sama yaitu sistem pengendalian internal dan sama-sama mencari pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan walaupun lokasi dan tahun penelitian yang berbeda.

F. KERANGKA KONSEPTUAL



Keterangan :

1. Variabel dependen (Y) yakni variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (X)
2. Variabel independen (X) yakni variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen (Y). Variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

X₁ : Penatausahaan Aset Daerah

X₂ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

G. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁴⁶

1. Pengaruh pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Penatausahaan aset daerah adalah bagian dari suatu sistem, yakni sistem akuntansi yang merupakan dari sistem informasi manajemen.⁴⁷ sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam organisasi. Sejalan dengan pengertian tersebut, penatausahaan aset daerah bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai keadaan dan sistem pengelolaan aset daerah disuatu wilayah. Jika penyajian informasi dalam penatausahaan barang milik daerah tersebut memadai, maka informasi tersebut berkualitas. Kekayaan pemerintah daerah disimbolkan dalam neraca berupa aset, dan aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, aset daerah termasuk dalam aset tetap.⁴⁸

Hasil penelitian yang dilakukan Anshari tentang pengaruh barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan kota Padang menunjukkan hasil bahwa aset daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Fxed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 99

⁴⁷ Yulpi Poae, *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik*hlm167-168

⁴⁸ Conda Liesy Y, dkk, *Analisis Pengelolaan*, hlm 123

kualitas laporan keuangan.⁴⁹ Berdasarkan teori dan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penatausahaan Aset Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Hipotesis ini sesuai dengan penelitian.

2. Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.⁵⁰ Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset negara.

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sebaliknya jika sistem akuntansi dilakukan dengan baik maka akan relevan jika digunakan untuk pengambilan keputusan.⁵¹ Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan.

⁴⁹ Anshari, *Pengaruh Pengelolaan* hlm 15

⁵⁰ Vani adelin, *Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada BUMN Di Kota Padang*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol 1 No 3, 2013, hlm 4

⁵¹ Desiana Anugrah B, Budi. S.B, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No 1, 2014, hlm 285-286

Hasil penelitian yang dilakukan Ni Luh Nyoman tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan kota Buleleng menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.⁵²

H₂ : Sistem pengendalian Internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

3. Penatausahaan aset daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan (bersama-sama).

Dalam penelitian ini, secara simultan diduga terdapat pengaruh antara penatausahaan aset daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₃ : Penatausahaan Aset Daerah dan Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

⁵² Ni Luh Nyoman, dkk, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi, Vol 2 No 1, 2014